

PENGARUH GENDER DAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KPP PRATAMA MAKASSAR SELATAN

Dwi Ayu Siti Hartinah H¹, Nila Sastrawaty², Farhan Dwinanda H³.

Universitas Negeri Makassar^{1,3}, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar²

Email: dwi.ayu@unm.ac.id¹, nila.sastrawati@uin-alauddin.ac.id³,
farhan.dwinanda@unm.ac.id³

Abstrak

Kepatuhan wajib pajak merupakan pondasi bagi sebuah negara namun tingkat kepatuhan sering kali dipengaruhi beberapa hal, antara lain variabel peran gender yang cenderung terabaikan. Beberapa penelitian terdahulu menemukan bahwa ada potensi perbedaan antara perilaku kepatuhan pajak laki-laki dan perempuan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh gender terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Makassar Selatan menggunakan *Theory of Planned Behavior*. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer, dimana peneliti menyebarkan langsung kuesioner di lapangan. sampel diambil dengan menggunakan *sampling incidental*, yaitu siapa saja yang ditemui peneliti secara tidak sengaja dapat dijadikan sampel yaitu sebanyak 100 koresponden. Hasil penelitian ini secara tegas menunjukkan bahwa gender perempuan memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap niat dan perilaku kepatuhan wajib pajak.

Kata Kunci: Gender dan Kepatuhan Wajib Pajak, dan *Theory of Planned Behavior*

Abstract

Taxpayer compliance is the foundation of a nation, but the level of compliance is often influenced by several factors, including gender, one of the most overlooked sociological variables. Several previous studies have found potential differences between male and female tax compliance behavior. This study aims to determine the influence of gender on individual taxpayer compliance at the South Makassar Pratama Tax Office (KPP Pratama) using the Theory of Planned Behavior. The method used in this study is quantitative. The data source used is primary data, where researchers directly distributed questionnaires in the field. Samples were taken using incidental sampling, namely anyone who was accidentally met by researchers could be sampled, namely 100 correspondents. The results of this study clearly show that female gender has a significant and positive influence on taxpayer compliance intentions and behavior.

Keywords: Gender and Taxpayer Compliance, and Theory of Planned Behavior

A. Pendahuluan

Kepatuhan pajak merupakan isu sentral dalam sistem perpajakan modern, khususnya di negara berkembang seperti Indonesia yang mengandalkan pajak sebagai sumber utama pendapatan negara. Kepatuhan

pajak tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi seperti pendapatan dan sanksi, tetapi juga oleh faktor non-ekonomi yang kompleks, termasuk aspek psikologis, sosial, budaya, dan demografis (Pope & Mohdali, 2011). Salah satu faktor individual yang banyak diteliti adalah gender, yang dalam konteks perpajakan sering dikaitkan dengan perbedaan perilaku antara laki-laki dan perempuan dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Dari perspektif Islam, kepatuhan terhadap pajak dapat dipandang sebagai bagian dari tanggung jawab sosial (*ibadah ijtima'iyah*) dan wujud ketaatan terhadap *ulil amri* sebagaimana termaktub dalam QS. An-Nisa [4]: 59. Kesadaran untuk membayar pajak juga sejalan dengan prinsip *maslahah 'ammah*, yakni upaya menghadirkan manfaat bagi masyarakat secara luas, serta menjaga keseimbangan ekonomi sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Hasyr [59]: 7 agar kekayaan tidak hanya beredar di kalangan tertentu saja. Dengan demikian, membayar pajak dapat dipahami sebagai bentuk kontribusi moral dan spiritual bagi pembangunan bangsa, yang menjadi tanggung jawab baik laki-laki maupun perempuan.

Isu gender dalam kepatuhan pajak telah menjadi sorotan di kanca internasional, meskipun hasil penelitian yang menunjukkan hasil yang beraneka ragam dan kadang kontradiktif. Secara konseptual gender bukan sekadar perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan, melainkan konstruksi sosial yang membentuk norma, nilai, peran, dan perilaku yang diharapkan dari masing-masing gender dalam masyarakat. Gender memengaruhi identitas, perspektif, dan interaksi individu, serta membentuk cara pandang terhadap kewajiban sosial, termasuk kepatuhan pajak. Dalam konteks perpajakan, gender dapat memengaruhi persepsi, motivasi, dan perilaku wajib pajak melalui internalisasi nilai-nilai sosial dan budaya yang melekat pada peran gender.

Dalam literatur perpajakan, istilah perpajakan berbasis gender (*gender-based taxation/GBT*) mengacu pada kebijakan pajak yang mempertimbangkan perbedaan kebutuhan, peran, dan kondisi sosial-ekonomi antara laki-laki dan perempuan (Pratama, 2023). Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi bias gender, baik eksplisit maupun implisit, yang dapat muncul dalam sistem perpajakan dan berpotensi menciptakan ketidakadilan.

di Indonesia sendiri peran gender dalam kepatuhan pajak tidak dapat dilepaskan dari struktur budaya, sosial, dan ekonomi yang masih didominasi oleh nilai-nilai patriarki. Dalam sistem perpajakan keluarga di Indonesia mengatakan bahwa suami merupakan sebagai kepala keluarga dan memegang hak utama dalam keputusan keluarga salah satunya dalam perpajakan. Hal ini mampu memunculkan bias yang implisit yang bisa merugikan perempuan khususnya mereka yang mencari nafkah. Sehingga munculnya dimensi ketidakadilan dan inkulisi sosial dalam sistem perpajakan.

Secara keseluruhan, interaksi antara gender dan kepatuhan pajak bersifat kompleks dan dibentuk oleh berbagai faktor sosial, budaya, dan psikologis. Meskipun perempuan umumnya menunjukkan kepatuhan yang lebih tinggi terhadap kewajiban perpajakan, hal ini dipengaruhi oleh faktor-faktor tambahan seperti status perkawinan, pertimbangan etika, dan norma

sosial, yang bersama-sama membantu menentukan pola spesifik gender dalam perilaku kepatuhan pajak.

Perbedaan gender dapat secara signifikan memengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak, dan pengaruh ini dapat dianalisis melalui perspektif *Theory of Planned Behavior* (TPB). TPB menyatakan bahwa perilaku individu didorong oleh tiga faktor utama: sikap, norma subjektif, dan kendali perilaku yang dirasakan (Ajzen, 2002). Dalam konteks perpajakan, sikap positif terhadap pajak, tekanan sosial untuk patuh, dan persepsi kemudahan atau kesulitan dalam memenuhi kewajiban pajak akan membentuk niat dan akhirnya perilaku kepatuhan.

Torgler dan Valev menemukan bahwa perempuan menunjukkan keengganan yang lebih besar terhadap korupsi dan penggelapan pajak di berbagai latar budaya, menunjukkan adanya hubungan yang kuat antara gender dan sikap kepatuhan (Torgler & Valev, 2010). Keengganan ini mungkin muncul dari proses sosialisasi yang lebih kuat menanamkan pertimbangan etika dan moral pada perempuan dibandingkan laki-laki (D'Attoma dkk., 2018).

Osman dan Turmin melaporkan bahwa gender merupakan prediktor yang relevan terhadap kepatuhan pajak sukarela, menunjukkan bahwa faktor-faktor pribadi seperti gender dan sikap individu secara signifikan memengaruhi perilaku wajib pajak (Osman & Turmin, 2023). Temuan mereka konsisten dengan penelitian Rusli dkk., yang menyoroti bahwa wajib pajak perempuan yang sudah menikah menunjukkan dinamika kepatuhan yang berbeda, yang menyiratkan bahwa status perkawinan, bersama dengan gender, dapat membentuk kecenderungan kepatuhan (Rusli dkk., 2025). Selain itu, variasi moral pajak yang mencerminkan motivasi intrinsik seseorang untuk memenuhi kewajiban pajak berperan sebagai moderator dalam hubungan antara pengetahuan dan kepatuhan, terutama di antara wajib pajak perempuan (Rusli dkk., 2025).

Abung dan Damayanti berpendapat bahwa meskipun gender memengaruhi kepatuhan pajak, pengaruh ini mungkin dimoderasi oleh faktor-faktor seperti "cinta uang", yang menunjukkan bahwa pertimbangan keuangan perempuan mungkin berbeda dari laki-laki, yang berkontribusi pada disparitas tingkat kepatuhan (Abung & Damayanti, 2023). Sebaliknya, penelitian Natasha dan Yustina tidak menemukan perbedaan gender yang signifikan dalam pengetahuan perpajakan yang memengaruhi kepatuhan, menunjukkan bahwa faktor psikologis dan sosial yang lebih mendalam kemungkinan memainkan peran penting (Natasha & Yustina, 2020).

Perilaku kepatuhan berkaitan erat dengan norma dan nilai gender; perempuan seringkali beroperasi dalam kerangka kepatuhan yang sangat dipengaruhi oleh standar sosial dan kebutuhan akan rasa hormat komunitas, yang mungkin kurang menonjol bagi laki-laki (Kangave dkk., 2021). Kecenderungan ini menunjukkan bahwa ekspektasi dan norma sosial dapat meningkatkan kepatuhan di kalangan perempuan, sementara laki-laki mungkin lebih termotivasi oleh insentif finansial (Osman & Turmin, 2023).

Suryanti et al., (2021) yang menyebutkan bahwa variabel sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku berhubungan langsung dengan kepatuhan pajak. Studi ini menekankan relevansi TPB dalam konteks kepatuhan pajak yang dikategorikan berdasarkan gender, menunjukkan bahwa pemahaman yang lebih dalam tentang perbedaan sikap dan kontrol yang dirasakan oleh pria dan wanita akan sangat berguna dalam merancang strategi kepatuhan pajak.

Secara keseluruhan, analisis berbasis gender terhadap kepatuhan pajak dengan menggunakan TPB dapat membantu pemangku kepentingan, seperti pemerintah dan lembaga perpajakan, dalam merancang strategi sosialisasi dan komunikasi yang lebih efektif menyesuaikan dengan perbedaan gender. Pendekatan gender tidak hanya akan meningkatkan inovasi dalam penegakan hukum pajak tetapi juga meningkatkan kepatuhan pajak secara keseluruhan.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan tujuan untuk menguji hubungan antar variabel bebas dan terikat. Populasi dalam penelitian ini yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Makassar Selatan. Pengambilan sampel dilakukan dengan *sampling incidental* yaitu teknik pengumpulan data yang siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat dijadikan sebagai sampel dalam penelitian ini (Sugiono, 2017:81). Sampel dalam penelitian yang terkumpul yaitu 100 responden. Variabel dalam penelitian terdiri dari gender sebagai variabel bebas dan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel terikat.

Pengumpulan data dalam penelitian ini bersumber dari kuesioner dengan menggunakan pengukuran skala likerts 1-5. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan analisis regresi sederhana, dengan bantuan SPSS Ver. 27. Adapun persamaan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \varepsilon \dots \dots \dots (1)$$

Keterangan:

Y = Kepatuhan wajib pajak
 α = Konstanta
 β = Koefisien regresi
 X_1 = Gender
 ε = Error

C. Hasil dan Pembahasan

Tabel 1
Hasil Uji Statistik

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	8.986	1.657		5.423	.000
	Gender	.526	.076	.573	6.915	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Hasil Data diolah dengan SPSS Ver. 27 (2025)

Berdasarkan table diatas dapat model regresi sebagai berikut:

$$Y = 8.986 + 0.526 + \varepsilon \dots\dots\dots (1)$$

Nilai α atau konstanta memiliki nilai sebesar 8.986 artinya, jika variabel gender bernilai 0, maka kepatuhannya wajib pajak memiliki nilai sebesar 8.986. Variabel Gender memiliki nilai probabilitas sebesar 0.000 lebih kecil dari 0.05, yang artinya variabel gender berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Nilai koefisien gender sebesar 0.526, artinya jika variabel gender mengalami kenaikan atau peningkatan maka diasumsikan variabel kepatuhan wajib pajak juga mengalami kenaikan sebesar 0.526. Sehingga dapat disimpulkan bahwa gender berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Theory of Planned Behavior (TPB) menyatakan bahwa seseorang memiliki intensi untuk melakukan suatu perilaku salah satunya seperti kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan pajak merupakan salah satu factor utama dari perilaku itu sendiri. Intensi ini dibentuk dari tiga komponen utama yaitu: Sikap (*Attitude*), norma subjektif (*subjective norms*), dan kontrol perilaku. Dalam penelitian mengenai kepatuhan pajak menunjukkan bahwa gender dapat memengaruhi bagaimana ketiga komponen TPB ini terbentuk dan pada gilirannya, memengaruhi tingkat intensi dan perilaku kepatuhan pajak itu sendiri.

Perbedaan gender seringkali terlihat dalam sikap wajib pajak terhadap kepatuhan. Misalnya, wanita mungkin menunjukkan sikap yang lebih positif terhadap kepatuhan pajak karena memiliki nilai-nilai sosial yang lebih tinggi seperti tanggung jawab dan keadilan, atau karena adanya perbedaan dalam persepsi risiko dan penalti dibandingkan pria. Sementara itu, norma subjektif terdapat tekanan sosial yang dirasakan seseorang sehingga dapat dipengaruhi oleh gender. Pria dan wanita mungkin merasakan tekanan yang berbeda dari kelompok referensi mereka baik dari keluarga, teman atau kolega mengenai kepatuhan pajak. Di mana ekspektasi sosial terhadap peran gender dapat memicu tingkat sensitivitas yang berbeda terhadap pandangan orang lain mengenai kejujuran fiskal.

Faktor gender perempuan sering dimasukkan sebagai variabel demografi yang memengaruhi niat wajib pajak untuk bersikap patuh, yang pada akhirnya menentukan perilakunya. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa wajib pajak wanita cenderung memiliki tingkat kepatuhan yang lebih tinggi dalam hal pelaporan dan pembayaran pajak dibandingkan pria. Hal ini terbukti dengan respon yang lebih banyak yaitu 57% dibandingkan respon laki-laki sebanyak 43%. Wajib pajak wanita mungkin memiliki sikap yang lebih positif terhadap kepatuhan pajak, melihatnya sebagai kewajiban moral dan kontribusi penting terhadap negara. Selain itu, mereka sering kali lebih peka terhadap Norma Subjektif, yang berarti harapan sosial dari keluarga atau komunitas untuk patuh pada aturan hukum, termasuk perpajakan, memiliki pengaruh yang lebih kuat terhadap niat mereka.

Tingginya kepatuhan pada perempuan juga dapat dikaitkan dengan sifat yang umumnya menghindari risiko (*risk-averse*) dan lebih teliti dalam urusan administrasi dan keuangan, sehingga mereka lebih berhati-hati dalam

menghindari sanksi atau konsekuensi negatif. Oleh karena itu, perempuan bisa lebih kuat karena mereka cenderung lebih teratur dalam mengelola dokumen dan memenuhi persyaratan perpajakan yang kompleks. Secara keseluruhan,

Penelitian yang dilakukan oleh Rasidava & Ratmono (2025) yang menyatakan bahwa perempuan cenderung lebih dipengaruhi oleh norma subjektif dan tekanan sosial, sementara laki-laki lebih mengedepankan pertimbangan rasional dan risiko. Perempuan umumnya melaporkan sikap pajak moral yang lebih tinggi, yang dapat memengaruhi tingkat kepatuhan mereka secara positif dibandingkan dengan laki-laki (Habib & Rahman, 2021). Namun berbanding terbalik dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Nita, et. al (2022), yang menyatakan bahwa gender tidak berperan dalam perilaku kepatuhan pajak, yang menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan signifikan dalam tingkat kepatuhan berdasarkan gender.

wanita lebih cenderung menunjukkan tingkat kepatuhan yang lebih tinggi dibandingkan pria. Perbedaan ini sering dikaitkan dengan beberapa faktor psikologis dan sosiologis, termasuk kecenderungan wanita untuk lebih patuh terhadap peraturan, menghindari risiko seperti sanksi pajak, dan memiliki sensitivitas yang lebih besar terhadap norma sosial dan kewajiban moral. Wanita mungkin lebih termotivasi untuk patuh karena mereka melihatnya sebagai kontribusi positif terhadap negara, sementara pria terkadang lebih fokus pada minimisasi pajak. Perbedaan ini menunjukkan bahwa karakteristik demografi seperti gender memainkan peran yang penting dalam membentuk niat berperilaku wajib pajak, yang pada akhirnya memengaruhi keputusan mereka untuk patuh atau tidak patuh.

D. Penutup

Hasil penelitian ini secara tegas menunjukkan bahwa gender perempuan memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap niat dan perilaku kepatuhan wajib pajak dalam kerangka *Theory of Planned Behavior (TPB)*. Tingginya kepatuhan ini didorong oleh cara wanita menunjukkan Sikap yang lebih positif terhadap kepatuhan pajak, melihatnya sebagai kewajiban moral dan kontribusi penting dan mereka lebih peka terhadap Norma Subjektif karena harapan sosial dari komunitas atau keluarga memiliki pengaruh yang lebih kuat terhadap niat. Perbedaan dalam niat dan perilaku ini menunjukkan bahwa gender adalah variabel demografi yang penting membentuk perilaku kepatuhan. Selain itu, tingginya kepatuhan wanita juga dikaitkan dengan faktor psikologis, yaitu kecenderungan wanita untuk menghindari risiko (risk-averse) dan lebih teliti dalam urusan administrasi dan keuangan. Sifat ini memungkinkan mereka memiliki Kontrol Perilaku yang Dipersepsikan yang lebih kuat, karena mereka lebih teratur dalam mengelola dokumen dan memenuhi persyaratan perpajakan yang begitu kompleks.

Diharapkan peneliti selanjutnya mampu mengembangkan penelitian ini agar jauh lebih baik lagi dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam perpajakan, salah satunya menggunakan teori humanisme

atau *rational choice theory* serta menggunakan variabel lain seperti *religion*/keagamaan dan lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abung, Y. and Damayanti, T. (2023). The influence between gender on tax compliance with love of money as a moderation variable. *Journal of Social Research*, 2(4), 1272-1285. <https://doi.org/10.55324/josr.v2i4.747>
- Ajzen, I. 2002. The Theory of Planned Behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, (50): 179-211
- D'Attoma, J., Volintiru, C., & Malézieux, A. (2018). Gender, social value orientation, and tax compliance. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3338701>
- Habib, M. and Rahman, Y. (2021). Taxpayers compliance determinants using fischer model. *Efficient Indonesian Journal of Development Economics*, 4(2), 1253-1262. <https://doi.org/10.15294/efficient.v4i2.44858>
- Kangave, J., Waiswa, R., & Sebagala, N. (2021). Are women more tax compliant than men? how would we know?.. <https://doi.org/10.19088/ictd.2021.006>
- Kemenkeu. (2025) (<https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Pendapatan-Negara-Tahun-2024-Tumbuh-Positif>) (Diakses pada tanggal 30 April 2025)
- Kemenkeu. (2025) <https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/1808066/djp-rasio-kepatuhan-wajib-pajak-di-2024-sebesar-8575-persen> (Diakses pada tanggal 30 April 2025)
- Natasha, I. and Yustina, A. (2020). Causal relations between knowledge, norms, and tax: a study of gender differences on taxpayers. *Ekulibrium Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Ekonomi*, 15(1), 14-26. <https://doi.org/10.24269/ekulibrium.v15i1.2020.pp14-26>
- Nita, E., Ahmad, A., & Santi, E. (2022). Tingkat pendapatan, sanksi perpajakan, dan gender terhadap kepatuhan pajak kendaraan bermotor (studi kasus pada wajib pajak kendaraan bermotor di kota padang). *aista*, 1(2), 128-141. <https://doi.org/10.30630/aista.v1i2.20>
- Osman, M. and Turmin, S. (2023). Factors influencing the individual taxpayers' voluntary compliance. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 13(9). <https://doi.org/10.6007/ijarbss/v13-i9/17695>
- Pope, J. & Mohdali, R. (2011). The Role of Religiosity in Tax Morale and Tax Compliance. *Australian Tax Forum*. https://www.researchgate.net/profile/Nor-Mohd-Ali-4/publication/290920060_The_role_of_religiosity_in_tax_morale_and_tax_compliance/links/569c9b6d08aea1476954fc89/The-role-of-religiosity-in-tax-morale-and-tax-compliance.pdf
- Pratama (2023). <https://pratamainstitute.com/mengenal-perpajakan-berbasis-gender-atau-gender-based-taxation-gbt> (Diakses pada tanggal 30 April 2025)
- Rasyidava, R., A. & Ratmono, D. (2025). He Influence of Social Norms, Trust in Government, Perception of Tax Justice, Perception of Government Spending, and Gender in Individual Tax Payer Compliance in Semarang

City. Diponegoro Journal of Accounting.
<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/download/49369/33196>

Rusli, Y., Habib, M., Irwan, I., Banjarnahor, P., & Sihombing, J. (2025). Analysis of the level of taxpayer compliance with Indonesian tax law for women with marital status. *JLPH*, 5(3), 1904-1915.
<https://doi.org/10.38035/jlph.v5i3.1327>

Suryanti, H., Pagalung, G., Haliah, Habbe, H. (2021). Taxpayer compliance in SME's sector: a theory of planned behavior. *Psychology and Education Journal*, 58(1), 490-503. <https://doi.org/10.17762/pae.v58i1.797>

Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Torgler, B. and Valev, N. (2010). Gender and public attitudes toward corruption and tax evasion. *Contemporary Economic Policy*, 28(4), 554-568.
<https://doi.org/10.1111/j.1465-7287.2009.00188.x>